ANALISIS KEGAGALAN KADERISASI PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF LAMPUNG 2019

(Skripsi)

Oleh:

Merita Andriani

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS KEGAGALAN KADERISASI PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF LAMPUNG 2019

Oleh:
Merita Andriani

Partai Gerindra telah melakukan pendidikan politik kepada para kadernya dan para calon legislatifnya untuk pemilihan legislatif 2019. Partai Gerindra merupakan partai yang paling banyak mencalonkan mantan narapidana koruptor pada pemilihan legislatif 2019 yang salah satunya berasal dari provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisa kaderisasi partai Gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan pengurus DPW Partai Gerindra Provinsi Lampung, kader partai beserta caleg yang diusung oleh partai, pengamat politik Universitas Lampung, KPU Provinsi Lampung serta Bawaslu Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah partai Gerindra gagal dalam melakukan kaderisasi di partai jika dilihat dari *pertama*, dari segi kognitif partai Gerindra tidak gagal karena telah melakukan pendidikan politik dengan baik dan dari segi afektif partai Gerindra tidak gagal karena partai telah melakukan Rapat Kerja Daerah secara rutin untuk menambah wawasan bagi para kader sedangkan dari segi psikomotor partai Gerindra gagal karena masuknya non kader di dalam partai dan banyak kader yang memutuskan keluar dari partai. *Kedua*, dari segi pelaku kaderisasi partai Gerindra gagal karena adanya kader yang berpindah partai dengan masuknya mantan narapidana korupsi dan partai Gerindra tidak melihat rekam jejak kader untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019 serta dari segi sasaran kaderisasi partai Gerindra dalam melakukan pendidikan politik masih belum tepat pada sasaran sehingga hal tersebut yang menyebabkan kader yang berpindah partai. *Ketiga*, dari segi model kaderisasi partai Gerindra hanya mementingkan kebutuhan internal partai untuk mencari massa sebanyak-banyaknya.

Kata kunci: Kaderisasi, Partai Politik, Pemilihan Legislatif

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FAILURE REGENERATION GERINDRA PARTY IN THE LAMPUNG LEGISLATIVE ELECTION 2019

By:
Merita Andriani

The Gerindra Party have done political education for its cadres and legislative candidates for the 2019 legislative elections. The Gerindra Party is the party that nominates most corrupt former prisoners in the 2019 legislative elections, one of which comes from the province of Lampung. The purpose of this study was to find out how to analyze the regeneration of the Gerindra party in the Lampung 2019 legislative elections. This type of research is qualitative descriptive by involving the management of the Gerindra Party in Lampung Province, party cadres and candidates who are carried by the party, political observers at the University of Lampung, Lampung Province KPU and Lampung Province Bawaslu. The results of this study were that the Gerindra party failed to regenerate in the party when viewed from the first, in terms of cognitive Gerindra party did not fail because it had carried out political education well and from the affective side of the Gerindra party did not fail because the party had regular Regional Work Meetings to add insight for cadres while in the psychomotor terms the Gerindra party failed because the entry of non cadres in the party and many cadres decided to leave the party. Secondly, in terms of cadre regeneration the Gerindra party failed because there were cadres who moved the party with the entry of former corruption prisoners and the Gerindra party did not see cadre track records to advance in the 2019 legislative elections and in terms of the regeneration target of the Gerindra party in conducting political education it was still not on target so that this causes the cadres to switch parties. Third, in terms of the regeneration model, the Gerindra party only emphasizes the internal needs of the party to seek as many masses as possible.

Key Words: Regeneration, Political Party, Legislative Elecetion

ANALISIS KEGAGALAN KADERISASI PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF LAMPUNG 2019

Oleh:

Merita Andriani

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**ANALISIS KEGAGALAN KADERISASI PARTAI GERINDA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF LAMPUNG 2019**
Nama Mahasiswa	:	Merita Andriani
No. Pokok Mahasiswa	:	**1516021045**
Jurusan	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** .....

Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

Penguji : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.** .....

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **15 Februari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

Merita Andriani
NPM. 1516021045

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Merita Andriani, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Mei 1997, Penulis merupakan anak tunggal dari putri pasangan Bapak Welly Ambardy Setiadjid dan Ibu Sri Wahyuni. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Al-Hidayah Kota Tangerang, Penulis melanjutkan pendidikan di SDN Kebon Besar 2 Kota Tangerang. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Kota Tangerang. Kemudian Penulis mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Kota Tangerang yang lulus pada tahun 2015.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur undangan SNMPTN pada tahun 2015, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2018 di bulan Januari, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

Motto

Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya
(Albert Einstein)

Teruslah bermimpi dan teruslah berjuang karena kesuksesan telah menanti di depan mata
(Merita Andriani)

Persembahan

Ku Persembahkan Karya Ini
Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala pengorbanan yang disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusan dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepadaku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-temanku yang selalu hadir untuk mendukungku

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Kegagalan Kaderisasi Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Lampung 2019" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Mama dan Papa tercinta, Welly Ambardy Setiadjid dan Sri Wahyuni atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tak mampu penulis balas atas segala jasa serta ketulusannya, Alhamdulillah anak semata wayangmu tidak akan merantau lagi setelah ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan dimanapun Mama dan Papa berada.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas ilmu, saran, kritikan yang ibu berikan kepada penulis guna terciptanya skripsi ini, terim kasih atas waktu ibu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kebaikan dari Allah SWT akan selalu tercurah untuk ibu baik di dunia maupun di akhirat.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas arahan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan ke penulis agar semangat dalam mengerjakan skripsi ini semoga sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi, S.IP., M.A selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis demi terciptanya skripsi yang layak dan terima kasih atas waktu luang bapak untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu skripsi penulis, terimakasih kepada Pak Maliki Ahyar, Pak Jauhari, Pak Firmansyah, Pak Rian, Pak Ricky, serta Pak Deddy Hermawan serta Pak Budi Harjo yang telah memberikan informasi kepada penulis semoga

segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak-bapak sekalian.

8. Sahabatku, partner travellingku, partner segala-galanya, Dyah Ayu Lestiyanie S.M. Terima kasih atas segala waktu, kenangan, kasih sayang, bantuan, motivasi, keceriaan yaang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu ada sejak 8 tahun terakhir yang selalu memberikan semangat kepada penulis walaupun penulis setiap hari selalu mengeluh tetapi selalu sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama ini dan selalu siap siaga ketika penulis ajak main, ngerjain skripsi di coffee shop walaupun akhirnya hanya wifian dan pindah ke mall, travelling yang penuh kengidean dengan naik gunung berdua, terima kasih atas waktu yang super luang. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kau berada, selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan yang akan kita capai nantinya dan semoga tetap menjadi sahabat penulis sampai kapan pun.
9. Sahabat-sahabatku sejak zaman dahulu kala. Dyah Ayu Lestiyanie S.M, Woro Jati Pertiwi, Putri Windasari, Vian Pratama, dan Dzaky Hasyim. Terima kasih tetap menjadi sahabat penulis sampai sekarang ini walaupun kalian super sibuk, jadwal main harus diatur sedemikian rupa karena waktu yang dimiliki terkadang kurang pas. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada.
10. Teman-temanku sejak menginjak kelas 12 SMA yang penuh dengan drama dan dunia percintaan yang terlalu rumit. Zahra Zeitira S. Sos, Karina Indraswari, dan Astri Nadya. Terima kasih selalu menemani penulis selama ini, yang selalu menanyakan penulis kapan pulang sebentar

lagi penulis akan tetap di Tangerang dan tidak akan merantau lagi hehe. Terima kasih atas segala dukungan serta canda tawa yang selalu tercurah ketika kita bertemu maupun melalui grup line kita dari jaman masih gabut, terima kasih atas waktu luang di sela-sela perkuliahan kalian yang mau penulis ajak main ke mall sampai bosan, Semoga kita tetap seperti ini sampai nantinya.

11. Annisa Firda Mujtahidah, terima kasih telah menemani penulis sampai sekarang ini walaupun kalian selalu menanyakan kapan penulis pulang untuk main. Terima kasih telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini untuk cepat pulang agar tidak berjauhan lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk selalu mendengar keluh kesah penulis yang penuh dengan drama. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kamu berada.
12. Teman-teman yang baru penulis kenal sejak beberapa tahun terkahir. Irda Yustina dan Fernanda Arghiea P. Terima kasih telah menemani penulis selama berada di tanah rantau ini, terima kasih atas canda tawa yang telah diberikan, terima kasih atas waktu gabutnya, serta terima kasih atas waktu kalian karena sebentar lagi penulis akan meninggalkan tanah rantau ini.
13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2015 kelas ganjil, Gilang, Ayuni, Diska, Arum, Dina, Putri, Tika, Linda, Fani, Ning, Meisandra, Ifa, Lisda, Destri, Luki, Ferdi, Zaki, Annisa Putri, Anmeysa, Dewi, Richo, Amelisa, Anisa Rizki, Robi, Arif, Rosa dan masih ada banyak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu-satu karena kebanyakan terima kasih telah menjadi teman sekelas sampai akhir masa studi penulis.

14. Teman-teman satu bimbingan yang penuh drama tentang dunia perskripsian, Untsa Sholihah, Khairunnisa Maulida, Aprillia, Annisa Earlitsya. Terima kasih atas segala dukungan serta saling memotivasi satu sama lain, terima kasih atas waktu yang singkat ini, dan terima kasih sudah menemani penulis ketika sedang revisian. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama nantinya.
15. Teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas genap, Nabilla Prilsilia, Nurhaliza, Faradhiba Fasha, Ellania Sukma, Aviv, Yulianda, Erica dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman penulis dari awal perkuliahan maupun sejak mengenal dunia perskripsian, terima kasih atas bantuan nya ketika penulis membutuhkan kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Teman-teman KKN selama 40 hari lamanya, Marel, Rofik, Ajeng, Ulfa, Yoga, Fadil. Terima kasih telh hadir dalam dunia perkuliahan selama kkn ini. Semoga tetap menjaga silahturahmi.
17. Terakhir, terimakasih untuk orang yang telah membantu skripsi ini dibelakang layar terimakasih atas kehadirannya untuk membantu dan memberi semangat kepada penulis. See u next....

Bandar Lampung, 6 Februari 2019

Penulis

.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10

II. Tinjauan Pustaka 11
A. Partai Politik 11
1. Pengertian Partai Politik 11
2. Fungsi Partai Politik 14
3. Tipologi Partai Politik 19
B. Kaderisasi 21
1. Pengertian Kaderisasi 21
2. Prinsip Kaderisasi 23
3. Model Kaderisasi 24
4. Jenjang Pengkaderan 26
5. Proses Kaderisasi 27
C. Nepotisme 27
D. Politik Uang 29
E. Konsep Pemilihan Legislatif 30
D. Kerangka Pikir 31

III. Metode Penelitian 34
A. Tipe Penelitian 34
B. Fokus Penelitian 35
C. Jenis dan Sumber Data 37
D. Informan 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Pengolahan Data 41
G. Teknik Analisa Data 42
H. Teknik Keabsahan Data 43

IV. Gambaran Umum 45
A.Sejarah Partai Gerindra 45
B. Visi dan Misi Partai Gerindra 47
C. Tujuan dan Fungsi Partai Gerindra 49
D. Struktur Kepengurusan Partai Gerindra Provinsi Lampung 50

V. Hasil dan Pembahasan 57
A.Pendidikan Politik
1). Kognitif 58
2). Psikomotor 62
3). Afektif 67
B. Proses Kaderisasi
1). Pelaku Kaderisasi 72
2). Sasaran Kaderisasi 79
C. Model Kaderisasi 83
D. Analisis Kaderisasi Partai Gerindra Provinsi Lampung 85

VI. SIMPULAN DAN SARAN 108
A.Simpulan 108
D. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data Daftar Calon Sementara partai peserta pemilu pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 3
2. Data Caleg Tersangkut Kasus Korupsi Pada Pemilihan Legislatif 2014 4
3. Data caleg bermasalah di Lampung tahun 2018 6
4. Data nama bakal calon legislatif mantan korupsi pada pemilihan legislatif tahun 2019 8
5. Tabel Data Informan 39
6. Tabel Triangulasi Kognitif Pada Kaderisasi Partai Gerindra 61
7. Tabel Triangulasi Psikomotor Pada Kaderisasi Partai Gerindra 66
8. Tabel Triangulasi Afektif Pada Kaderisasi Partai Gerindra..... 71
9. Tabel Triangulasi Pelaku Kaderisasi Pada Kaderisasi Partai Gerindra 78
10. Tabel Triangulasi Sasaran Kaderisasi Pada Kaderisasi Partai Gerindra 82
11. Tabel Triangulasi Model Kaderisasi Pada Kaderisasi Partai Gerindra..... 84
12. Tabel Daftar Caleg Korupsi di Lampung tahun 2018..... 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pikir 33

2. Dokumentasi Pemberitaan Caleg Eks Koruptor di Media *online* 93

3. Dokumentasi tentang Pemberitaan Pencalonan Putra Luar Daerah di Provinsi Lampung..... 102

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran partai politik di Indonesia merupakan salah satu peran yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Partai politik di dalamnya memiliki fungsi-fungsi yang salah satunya yaitu fungsi rekrutmen politik, dimana fungsi rekrutmen politik ini adalah untuk mencetak pemimpin yang berkualitas serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Organisasi partai politik sudah sewajarnya terdapat seleksi, dan kaderisasi politik. Hal ini berfungsi untuk reformasi dalam regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia (Fajrina: 2017: 1).

Partai politik memiliki sebuah tugas yang tidak kalah penting dengan yang lainnya yaitu dengan adanya pola rekrutmen dan kaderisasi di dalam partai. Kaderisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang partai politik.

Arus utama dalam pola rekrutmen adalah dengan adanya kaderisasi yang demokratis melalui partai politik. Partai politik sudah sewajarnya memiliki strategi untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik. Kaderisasi dan pola rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin yang dilakukan guna untuk mencetak calon pemimpin yang berkualitas.

Kaderisasi adalah sebuah proses pendidikan yang sifatnya jangka panjang untuk menanamkan nilai serta moral kepada seorang kader. Kader-kader inilah yang harus meyakini bahwa nilai-nilai bersama dijadikan sebagai pembentuk watak dan karakter dalam berorganisasi. Rendahnya kualitas mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik menunjukkan lemahnya performa partai politik. Data KPU dalam kumparan.com sebanyak 38 mantan narapidana korupsi masuk ke dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia salah satunya Alhajar Syahyan dari dapil tanggamus yang diusung dari partai Gerindra (Ngopi Bareng dalam Kumparan.com diakses pada 21 September 2018 pukul 19.45 WIB).

Penelitian Harahap mengatakan mayoritas partai politik saat ini belum mampu menjalankan pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi. Semestinya karena partai politik dipengaruhi oleh politik kekerabatan, serta mekanisme kaderisasi instan dari kalangan artis karena dianggap dapat mendulang suara karena popularitasnya. Banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memilkul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali

menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya (Harahap (2017: 1).

Fakta yang ada sebanyak 50% atau 150 calon legislatif luar daerah, masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dapil Lampung I dan II untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Realitas politik ini dituding sebagai bentuk kegagalan kaderisasi partai politik. Ironisnya partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra pun masih dominan mengusung caleg luar daerah untuk dimasukkan ke dapil Lampung I dan dapil Lampung II. Fenomena ini membuat partai menjadi pragmatis dengan merekrut orang-orang yang kuat secara finansial di daerahnya (Mediyansyah dalam Kupastuntas.co diakses pada 02 September 2018 pukul 20:35 WIB). Berikut Daftar Calon Sementara partai peserta pemilu pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019:

Tabel 1. Daftar Calon Sementara Partai Peserta Pemilu Pemilihan Legislatif 2019 di Provinsi Lampung

No	Nama Partai	Jumlah Caleg berasal dari luar daerah	
		Dapil 1	Dapil 2
1	PKB	2 orang	1 orang
2	Gerindra	5 orang	5 orang
3	PDIP	4 orang	8 orang
4	Golkar	7 orang	5 orang
5	Nasdem	3 orang	3 orang
6	Garuda	1 orang	3 orang
7	Berkarya	7 orang	8 orang
8	PKS	1 orang	1 orang
9	Perindo	5 orang	8 orang
10	PPP	9 orang	8 orang
11	PSI	7 orang	2 orang
12	PAN	5 orang	6 orang
13	Hanura	7 orang	6 orang
14	Demokrat	3 orang	9 orang
15	PBB	2 orang	4 orang
16	PKPI	3 orang	2 orang
Jumlah Keseluruhan 150 orang caleg dari luar daerah			

Sumber: Data KPU RI 2018

Fenomena mengusung calon legislatif dari luar daerah di duga menimbulkan pro kontra karena hal tersebut dinilai tidak efektif dan merupakan salah satu indikasi kegagalan kaderisasi partai politik di tingkat daerah. Terdapat 150 calon legislatif luar daerah mencalonkan dirinya di Provinsi Lampung untuk merebutkan kursi DPR pada pemilihan Legislatif tahun 2019. Partai Gerindra sendiri mengusung 5 caleg dari dapil Lampung I dan 5 caleg dari dapil Lampung II. Berikut data caleg tersangkut korupsi pada Pemilihan Legislatif tahun 2014:

Tabel 2. Data Caleg Tersangkut Kasus Korupsi Pada Pemilihan Legislatif 2014

No.	Asal Partai	Jumlah Caleg
1	Demokrat	13 orang
2	PDIP	10 orang
3	Golkar	10 orang
4	PKB	5 orang
5	Gerindra	3 orang
6	Hanura	3 orang
7	PPP	2 orang
8	Nasdem	1 orang
9	PAN	1 orang
Jumlah 48 orang		

Sumber: ICW tahun 2014

Berdasarkan data ICW 48 Anggota legislatif periode 2014-2019 yang tersangkut korupsi tersebar di 17 wilayah. Diantaranya Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Banten, Jambi, Papua dan Papua Barat (Ichsan Emerald Alamsyah dalam republika.co.id diakses 20 September 2018 pukul 21.24 WIB).

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasito Raharjo mengatakan kenekatan partai politik untuk tetap mencalonkan eks narapidana itu disebabkan oleh kebutuhan dana dan elektabilitas untuk partai serta macetnya sistem kaderisasi di partai. Partai membutuhkan dana dan juga mengamankan elektabilitas partai untuk menguasai dapil tertentu sehingga eks koruptor dimajukan sebagai kandidat karena mempunyai sumber daya material yang kuat. Partai politik memilih mengusung kader lama meski koruptif daripada mendidik kader baru sehingga mengakibatkan kemacetan kaderisasi (Kustin Ayuwuragil dalam cnnindonesia.com diakses tanggal 13 Oktober 2018 pukul 23:43 WIB).

Penelitian Amaliya mengatakan bahwa dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, setiap partai tentunya memiliki hambatan. Masalah anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan (kaderisasi) masih terbatas, sedangkan jumlah kader muda semakin banyak, tentunya hal tersebut akan menghambat kualitas proses kaderisasi. Ditemukannya kader yang bergabung dengan alasan sebagai ajang coba-coba dan belum memiliki pemahaman mengenai perjuangan partai politik (Amaliya 2017: 1).

Kegagalan kaderisasi dilihat dari data Bawaslu mengungkap sengketa terkait mantan narapidana korupsi yang terjadi di 12 daerah di Indonesia. Total sekitar ada 17 orang mantan narapidana koruptor yang diloloskan oleh bawaslu. Provinsi Lampung masuk dalam daftar Bawaslu terkait meloloskan mantan narapidana koruptor yang diusung oleh Gerindra DPRD Tanggamus yaitu

Alhazar Syahyan (Bahtiar Rifai dalam detiknews.co diakses pada 10 September pukul 21.00 WIB).

Berikut data caleg bermasalah di Provinsi Lampung tahun 2018 baik yang tersandung kasus korupsi, narkoba, maupun kasus pelanggaran lainnya:

Tabel 3. Daftar nama caleg bermasalah di Lampung tahun 2018 dalam Pemilihan Legislatif 2019.

No.	Nama Caleg	Asal Partai
1.	Achmad Junaidi Sunardi	Golkar
2.	Bonza Kesuma	PAN (dapil 7 Kab. Lampung Utara)
3.	Daroni Mangku Alam	Demokrat (dapil 5 Kab. Lampung Utara)
4.	Mukhlis Basri	Gerindra (dapil 4 Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat)
5.	Alhajar Syahyan	Gerindra (dapil 4 Tanggamus)
6.	Hipmi Idris	PDIP

Sumber: Bawaslu 2018

Fenomena kegagalan dalam kaderisasi juga terlihat dari rekam jejak Calon Legislatif (Caleg) tidak menjadi skala prioritas bagi Partai Gerindra Provinsi Lampung dalam pola pengkaderan Caleg. Rekam jejak Calon Legislatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas partai politik sekaligus menjadi bagian dari kontrol pada proses pengkaderan caleg. Pencalonan Mukhlis Basri pada Pemilihan Legislatif 2019 yang notabenenya mantan terpidana narkoba saat menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus menjadi bukti jika kaderisasi di partai besutan Prabowo mengalami disfungsi akut (Pelitanusantara.com diakses pada 03 September 2018 pukul 20.09 WIB).

Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Kamis (13/9/2018). MA memperbolehkan mantan koruptor maju dalam konstelasi pemilihan anggota legislatif pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang (Triyadi Isworo dalam lampost.co diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 20.15 WIB). Kasus yang terjadi pada partai Gerindra dimana rekam jejak Calon Legislatif tidak diperhatikan lagi dan tentunya menjadi catatan khusus bagi partai politik untuk tidak gegabah mencalonkan mantan napi kembali menjadi caleg.

Penelitian Danny menyatakan bahwa partai politik di Indonesia belum optimal dalam rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik terindikasi gagal dalam menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi dalam demokrasi yang secara tidak demokratis, transparan dan berbasis meritokrasi. Pengkaderan untuk internal partai seringkali dilakukan melalui cara-cara yang kental dengan kartelisme (Danny 2017: 1)

Kaderisasi partai politik diduga gagal dilihat dari data bawaslu menyatakan Gerindra menjadikan partai pimpinan Prabowo Subianto sebagai partai politik peserta pemilu 2019 yang paling banyak mengajukan calon legislatif mantan korupsi yaitu 27 calon legislatif. Indikasi kaderisasi yang dinyatakan gagal juga seperti kader gagal mengintegrasikan nilai-nilai partai ke dalam dirinya sehingga partai tidak bisa membedakan atara keunikan kadernya dengan

kandidat yang bukan berasal dari partainya (Fitria Chusna Farisa dalam kompas.com diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 21.10 WIB).

Berikut data bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Bakal Calon Legislatif Mantan Korupsi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

No.	Nama Partai	Jumlah bakal calon legislatif
1.	Gerindra	27 orang
2.	Golkar	23 orang
3.	Berkarya	16 orang
4.	Hanura	14 orang
5.	Demokrat	13 orang
6.	NasDem	13 orang
7.	Perindo	11 orang
8.	PBB	8 orang
9.	PKPI	7 orang
10.	PPP	6 orang
11.	Garuda	6 orang
12.	PKB	6 orang
13.	PKS	5 orang
14.	PDIP	5 orang
15.	PAN	5 orang
16.	PSI	-

Sumber: Bawaslu RI 2018

Menghadapi Pemilihan Legislatif 2019, masing-masing partai politik memiliki caranya tersendiri untuk menjalankan proses mengkader bakal calon legislatif (bacaleg). Partai Gerindra merupakan salah satu partai besar yang akan mengikuti Pemilihan Legislatif 2019. Gerindra mencalonkan orang dari luar daerah serta rekam jejak caleg di Gerindra ini juga bukan menjadi tolak ukur lagi dan juga Partai Gerindra ini mencalonkan mantan korupsi untuk menjadi anggota Legislatif.

Pemilihan Legislatif yang akan berlangsung pada 2019 partai politik beramai ramai mengusung kandidatnya yang berasal dari berbagai latar belakang masing-masing kader. Alhajar Syahyan merupakan satu-satunya bakal calon legislatif di Lampung yang sedang tersandung aturan larangan mantan koruptor yang menjadi caleg. Beliau dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat penetapan daftar calon sementara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa partai Gerindra diduga kurang selektif dalam menyeleksi kandidatnya untuk maju dalam Pemilihan Legislatif 2019 (Tri Yulianto dalam Tribunlampung.co diakses pada 25 September 2018 pukul 21.30 WIB).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai fenomena kegagalan kaderisasi maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul "Analisis Kegagaan Kaderisasi Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Lampung 2019".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: "Bagaimana analisis kegagalan kaderisasi partai gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kegagalan kaderisasi partai Gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

   Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan sumber pengetahuan akademis mengenai kegagalan kaderisasi partai Gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi partai gerindra sendiri khususnya pada kaderisasi bakal calon untuk lebih selektif dalam melakukan pengkaderan di dalamnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Carl Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Rahman 2007: 102). Budiarjo mengatakan secara bahwa umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi , nilai-nilai, dan cita -cita yang sama (Rahman 2007: 102).

Institute for Multyparty Democracy (2006) mengatakan bahwa partai politik dibutuhkan karena pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemetintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis. Koirudin (2004) dalam tulisannya mengatakan sebagaimana salah satu prasyarat dari terwujudnya demokrasi adalah adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat

dan sebagai media untuk melakukan bargaining kebijakan dengan negara (Iskandar 2016: 31).

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. R.H. Soltau mendefinisikan partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Rahman 2007:102).

Pemikiran lain tentang partai politik juga diruangkan oleh Giovani Sartori mengatakan bahwa partai politik itu adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam sebuah sistem politik modern yang demokratis (P. Anthonius Sitepu 2012:188-189).

Robert Michels mengatakan secara sederhana partai politik sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para angotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat unuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri,

memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Partai pada umumnya memiliki kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya (Jurdi 2014: 140).

Cheppy Haricahyono mengatakan partai politik merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang merdeka dan berdaulat. Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada (Haricahyono, 1991: 189)

Berbicara partai politik paling tidak menyangkut tiga pihak. Pertama, adalah massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif dan yang tingkat kesetiannya terhadap partai tidak benar-benar mengakar; kedua, adalah *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai; dan ketiga adalah kelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam menentukan garis kebijaksanaan partai (Haricahyono 1991: 191).

Menurut Schumpter partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi

politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan. (Schumpter, 2003:283)

2. Fungsi Partai Politik

Janos Simon mendefinisikan enam fungsi dari partai politik (Jurdi 2014: 142) sebagai berikut:

a. Fungsi Sosialisasi Politik

Terlihat signifikan ketika seorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudian mencari "figur" yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Sebab itu, partai politik berfungsi sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu.

b. Fungsi Mobilisasi

Fungsi partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini yaitu: mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi; mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi partai politik untuk membawa warga negara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warga negara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi , dan debat politik.

d. Fungsi Legitimasi

Mengacu pada kegiatan kebijakan partai politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensisistem politik. Seperti diketahui, partai politik memiliki massa pemilih.

e. Fungsi Representasi

Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen.

f. Fungsi Aktivis dalam Sistem politik

Partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 11, dijelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.

5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Fungsi partai politik lainnya (Rahman 2007: 103) sebagai berikut:

1. Sosialisasi politik

   Fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada.

2. Partisipasi politik

   Fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota, mayarakat yang ada dalam jangkauan partainya.

3. Komunikasi politik

   Fungsi ini adalah fungsi yang menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

4. Artikulasi kepentingan

   Fungsi yang menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

5. Agregasi kepentingan

   Fungsi partai politik ini untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar dengan kelompok kepentingan.

6. Pembuat kebijaksanaan

   Fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional.

Penulis Muchammad Ali Safa'at (2011: 66) menjelaskan beberapa fungsi partai politik sebagai berikut:

1. Fungsi Komunikasi dan Sosialisasi Politik

   Fungsi ini menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin komunikasi dan sosialisasi dua arah yang dalam bentuk idealnya dapat mewujudkan *government by discussion* antara rakyat dan pemerintah.

2. Fungsi Rekrutmen Politik

   Fungsi ini dilakukan untuk merekrut dan melakukan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan yang nantinya calon-calon tersebut akan dipilih oleh rakyat.

3. Fungsi pengelola Konflik Politik

   Fungsi ini mencakup pengelolaan konflik masyarakat dimana fungsi ini diperukan pada negara multietnis yang memiliki permasalahan

dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnitas lebih mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan daripada program atau ideologi.

Jurdi (2014:141) juga menjelaskan fungsi lain dari partai politik sebagai berikut:

1. Agregasi Kepentingan

   Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.

2. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat

   Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama

3. *Staffing Government*

   Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.

4. Mengkoordinasi Lembaga-lembaga Pemerintah

   Fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.

5. Mempromosikan Stabilitas Politik

   Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik.

Ranney dan Kendal (1956) juga mendefinisikan partai politik sebagaimana grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atau birokrasi dan kebijakan publik (Firmanzah 2008: 68).

2. Tipologi Partai Politik

Pada dasarnya ada 2 bentuk tipologi partai politik yang hadir dalam kehidupan demokrasi. Partai politik sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tipologi tersebut adalah berdasarkan kader dan berdasarkan massa kedua tipologi ini hadir berdasarkan ideologi yang diwujudkan berdasarkan ide-ide perjuangan partai dan melalui program kerja partai dan melalui program kerja partai yang ditawarkan oleh partai tersebut.

Ada beberapa jenis kepartaian (*party system)* yang ada di dunia. Maurice Duverger (Rahman 2007: 105-107) mengadakan klasifikasi berdasarkan tiga kategori yaitu:

1. Sistem Partai Tunggal

   Sistem yang dipakai oleh negara baru merdeka, negara multi etnis dan negara komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gejolak-gejolak sosial politikyang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara.

2. Sistem Dua Partai

   Sistem ini diartikan bahwa dalam suatu negara menganut dua partai politik atau adanya beberapa partai tetapi hanya dua partai yang memiliki peranan negara.

3. Sistem Multipartai

   Penyebabnya adalah sistem banyak partai ini adalah karena adanya aneka ragam suku, agama, ras dan golongan yang ada dalam suatu negara. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia dan sebagainya.

Anwar Arifin (Arifin 2013: 85) mengemukakan bahwa tipologi partai berdasarkan basis sosiologis yang dimiliki terbagi empat macam yaitu:

1. Partai Massa

   Partai ini merupakan partai politik yang mengutamakan anggota yang besar jumlahnya dengan berbasiskan kelas sosial tertentu atau berbasis agama. Partai Gerindra memiliki ideologi nasionalis dan termasuk ke dalam partai massa.

2. Partai Kader

   Menunjuk kepada partai politik yang mengutamakan elit dan aktivis partai yang militan dan terpandang dalam jumlah yang terbatas.

3. Partai Kartel

   Partai kartel merupakan partai politik yang melakukan koalisi karena kekurangan jumlah kursi di parlemen akibat kekurangan pemilih dalam pemilihan umum, sehingga ideologi partai tidak lagi menjadi perhatian.

4. Partai Ideologis

   Partai ideologis yaitu partai yang mengutamakan ideologi sebagai basis perjuangan pimpinan dan anggotanya.

B. Kaderisasi

1. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi berlangsung dalam dua spektrum, yaitu sosialisasi politik dan budaya politik. Sosialisasi politik melihat kaderisasi sebagai proses penyerapan nilai-nilai tertentu terhadap individu-individu tertentu pula. Budaya politik, kaderisasi bertujuan untuk "mempengaruhi" budaya politik yang sudah ada, tetapi dinilai kurang sesuai dengan tujuan pengkaderan (Sjamsuddin 1993:87).

Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi (Firmanzah 2008:71).

Muhammad Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin

yang pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinanya, baik dikehendaki maupun tidak (Harahap: 2).

Kaderisasi dapat pula diartikan sebagai proses penyiapan bagi penggantian personalia yang nantinya akan berlangsung dalam lembaga-lembaga masyarakat. Calon-calon pengganti dipersiapkan dengan jalan melengkapkan mereka dengan nilai-nilai dari lembaga itu, yakni nilai-nilai yang mencerminkan identitas lembaga mereka. Wujud dari sistem yang ditempuh untuk itu adalah tergantung pada watak atau karakter masing-masing lembaga (Sjamsuddin 1993: 91).

Kaderisasi kepemimpinan partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan, sehingga banyak partai politik melahirkan kader-kader instan. Kegagalan kaderisasi kepemimpinan di tubuh partai politik terjadi karena partai politik tidak menegakkan fungsi partai politik secara utuh dan benar. Partai politik perlu ditekankan tentang kaderisasi yang memiliki jenjang dan aturan tersendiri pada tubuh partai. Tanpa kaderisasi yang baik maka akan sulit menemukan kader-kader partai yang berpotensi, militan, dan paham terhadap politik (Permana 2015: 755).

Mewujudkan proses kaderisasi yang lebih baik diperlukan manajemen parpol yang baik sebelumnya. Manajemen parpol yang baik dilihat dari kepengurusan, pengelolaan keuangan, dan program kerja partai parpol.

Paling mudah dilihat dan dirasakan masyarakat adalah kepengurusan dan program kerja parpol tetapi, hal ini biasanya hanya menonjol menjelang proses pemilihan, baik pemilu maupun pilkada padahal, proses demokrasi bukan hanya saat pemilihan.

Penulis menggunakan teori Stradling mengenai pendidikan politik (Sanusi 2016: 33) bahwa substansi pendidikan politik meliputi Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Penulis menggunakan teori tersebut karena kaderisasi pada partai politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik bagi para kadernya.

2. Prinsip Kaderisasi

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip kaderisasi (Haris dkk 2016: 52*)* sebagai berikut:

a. Terbuka

Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training)* dalam proses kaderisasi.

b. Non Diskriminatif

Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender serta suku.

c. Berjenjang

Penjenjangan kaderisasi partai politik didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Rasionalisasi penjenjangan model hierarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

3. Model Kaderisasi

Model kaderiasi terdapat dua macam model (Rivai 2014: 96) yakni:

a. Kaderisasi informal

Indikator kaderisasi infromal sebagai berikut:

a) Berkepribadian positif
b) Gigih
c) Berloyalitas
d) Berdedikasi terhadap organisasi
e) Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Kaderisasi formal

Pada kaderisasi formal ini cenderung lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan disengaja.

Terdapat beberapa model kaderisasi dalam partai politik (Haris dkk 2016: 54*)* sebagai berikut:

a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai modern, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan trainning tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.

b. Kaderisasi untuk Non Anggota Partai Politik

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang persangkutan.

4. **Jenjang Pengkaderan**

Jenjang kaderisasi pada umumnya dibagi dalam tiga, yakni tingkat pertama, tingkat menengah/madya, serta tingkat utama (Haris dkk 2016: 55) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kaderisasi Tingkat Pertama

Kaderisasi tingkat pertama biasanya lebih menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi parpol. Kaderisasi pada tingkat pertama biasa bertujuan untuk membangun budaya dan konsolidasi partai politik pada peserta kaderisasi. Internalisasi nilai-nilai partai politik pada tingkat ini proses kaderisasi juga dipergunakan untuk membekali anggota partai mengenai keterampilan manajerial dan tata kelola partai yang bersifat sederhana. Kaderisasi pada tingkat pertama ini biasanya dilakukan juga pelatihan tentang masalah kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media dan juga *public speaking* yang bersifat sederhana.

b. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi tingkat madya ini bisa dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat propinsi dan/atau anggota DPRD tingkat Provinsi serta Kepala Daerah tingkat Provinsi outcome-nya pengurus tingkat Provinsi, anggota DPRD dan kepala daerah tingkat Provinsi. Kaderisasi pada jenjang ini biasanya para kader lebih banyak dibekali keterampilan terkait dengan pemenangan pemilu seperti keterampilan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal terkait mobilisasi massa, keterwakilan politik dan *problem solving skil.*

c. Kaderisasi Tingkat Utama

Kaderisasi tingkat utama diperuntukan bagi calon pengurus parpol, anggota legislatif tingkat pusat, serta calon presiden dan wakil presiden. Kaderisasi pada tingkat utama ini selain masalah internalisasi nilai-nilai partai, pengetahuan tentang masalah kepemiluan baik yang menyangkut masalah regulasi maupun strategi pemenangan pemilu, juga diberikan pengetahuan manajerial yang menyangkut pemahaman tentang masalah-masalah dan isu-isu pada skala nasional dan global, pemahanan tentang kebijakan partai di tingkat nasional, dan lain-lain.

5. Proses Kaderisasi

Proses kaderisasi parpol ada dua hal pokok yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek), Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol. Mereka pula yang akan memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi di masa depan (Permana: 2015: 761).

C. Nepotisme

Praktik politik patronase bisa berlangsung baik antar anggota keluarga maupun tidak. Politik dinasti, misalnya, merupakan bentuk politik patronase khusus yang melibatkan orang tua dengan anaknya, sedang politik nepotisme menunjuk pada politik patronase yang melibatkan seorang pejabat politik dengan satu atau lebih anggota keluarganya. Konsep politik nepotisme

memiliki cakupan lebih luas, karena mencakup tiga level ke atas dan tiga level ke bawah dari hubungan keluarga (Arisandi 2016: 1869).

Berbagai praktik politik nepotisme, baik untuk mendapatkan popularitas, legalitas, maupun elektabilitas secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan munculnya: (1) Stigmatisasi Negatif terhadap Pelaku Politik Nepotisme, (2) Resistensi Simbolik terhadap Pelaku Politik Nepotime, (3) Dukungan Bersifat Transaksional bagi Pelaku Politik Nepotisme, dan akhirnya (4) Elektabilitas Rendah bagi Pelaku Politik Nepotisme (Arisandi 2016: 1872).

Ciri perilaku politik aktor individu nepotis dan nepos bersama sejumlah aktor politik lain, baik aktor individu maupun kolektiva yang membentuk jejaring politik nepotisme daerah. Ciri perilaku politik elit terdapat beberapa yang paling menonjol adalah sifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis dari perilaku mereka (Arisandi 2016: 1874).

Studi Eisenstandt S.N dan Roniger Luis (1984) dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada empat argumentasi (Sutisna 2017: 106) yakni:

1. Kepercayaan (*trusty*)

   Maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan.

2. Kesetiaan (*loyality)*

   Kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain.

3. Solidaritas (*solidarity)*

   Kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat.

4. Proteksi (*protection)*

   Terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain.

D. Politik Uang

Indra Ismawan menyatakan bahwa money politic dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Johny Lomulus mengangap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut (Ananingsih 2016: 50).

Gary Goodpaster mengatakan bahwa politik uang itu merupakan salah satu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum. Politik uang

pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan (Ananingsih 2016: 51).

Penulis juga menguatkan dengan teori money politik yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori money politik menurut Thahjo Kumolo yaitu Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Rahmat 2017: 28).

E. Konsepsi Pemilihan Legislatif

Pendapat Schumpter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partai politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Sitepu 2012: 177)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana suksesi politik dalam sebuah negara yang demokratis, melalui pemilu rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga

sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri (Djuyandi 2014: 1203).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang –undang. Anggota – anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat (DPR) (Lumingkewas 2014: 3).

E. Kerangka Pikir

Penulis dalam menenentukan kerangka pemikiran dengan penelitian yang berjudul "Analisis Kegagalan Kaderisasi Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Lampung 2019". Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi objek yang akan diteliti. Objek yang ditentukan Penulis dalam penelitian ini yaitu Partai Gerindra.

Penulis menggunakan teori Stradling tentang pendidikan politik (Sanusi 2016: 33) bahwa substansi pendidikan politik meliputi Pertama, kognitif yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, Psikomotor yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan

komunikasi. Ketiga, afektif yaitu sikap dan nilai-nilai prosedural. Penulis menggunakan teori tersebut karena kaderisasi pada partai politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik bagi para kadernya

Penulis juga menggunakan proses kaderisasi parpol ada dua hal pokok yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek). Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol (Permana: 2015: 761).

Penulis menggunakan model kaderisasi formal dan informal (Veithzal 2014: 96) untuk menentukan obyek apakah menggunakan kaderisasi model formal atau informal. Kaderisasi formal yaitu cenderung lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, dan terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kaderisasi informal yaitu yang memiliki indikator berkepribadian positif, gigih, berloyalitas, berdedikasi terhadap organisasi, pasrah kepada Tuhan YME.

Penelitian ini menggunakan teori tentang pendidikan politik, proses kaderisasi serta model kaderisasi untuk melihat partai Gerindra Provinsi Lampung telah gagal dalam melakukan kaderisasi di dalam partainya pada tahapan apa. Penelitian ini menggunakan teori-teori tersebut untuk menganalisa kegagalan kaderisasi partai Gerindra Provinsi Lampung berdasarkan pada faktanya partai tersebut mencalonkan mantan narapidana koruptor pada pemilihan legislatif 2019.

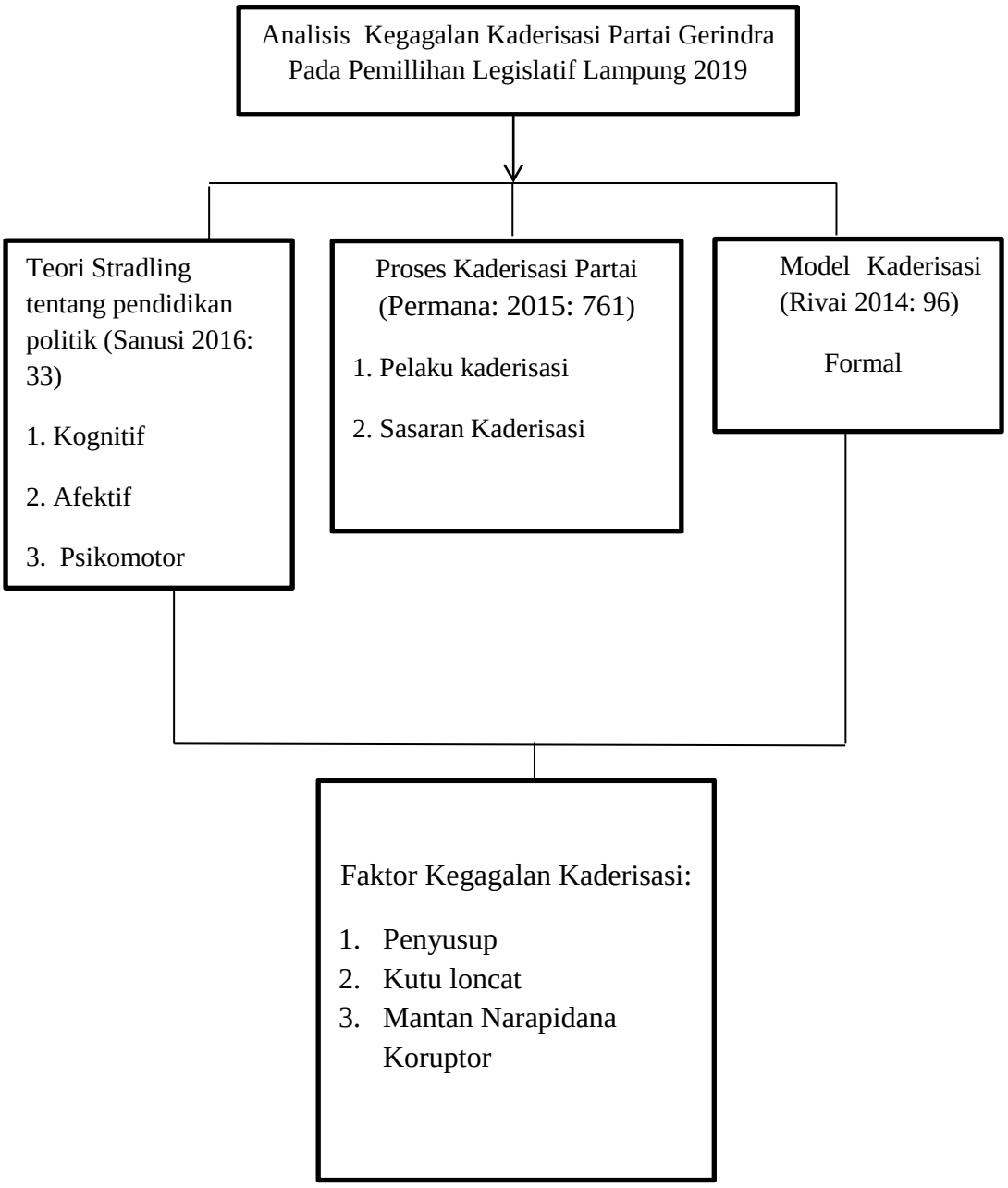

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian dengan judul analisis kegagalan kaderisasi partai gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019 menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis dalam penelitian kualitatif ini lebih berdasakan pada fenomenologis dengan berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Penelitian kualitatif obyeknya adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia dan diteliti dalam kondisi sebagaimana atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (Nawawi 1995: 208). Penelitian kualitatif juga di definiskan sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong 2014:5).

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek , dibandingkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Pengertian itu jelas bahwa pendekatan kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipoteis sebagai generalisasi, untuk

diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus (Nawawi 1995: 209).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang diteliti oleh penulis dalam penelitian analisis kegagalan kaderisasi partai gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019 memerlukan data lapangan yang sebagaimana sifatnya adalah faktual. Menurut peneliti mengumpulkan variabel dalam kasus yang diteliti kemungkinan dapat membuat kesimpulan tentang objek yang menjadi sasaran agar memenuhi tujuan kualitatif.

Penulis menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab serta menjabarkan bagaimana analisis kegagalan kaderisasi partai gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019. Penulis juga sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode wawancara serta pada penelitian ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak menggunakan angka.

B. Fokus Penelitian

Pada hakikatnya penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti Lincoln dan Guba (Moleong 2014:93). Penelitian ini penulis menegaskan dan memfokuskan penelitian proses kaderisasi menggunakan teori tentang pendidikan politik (Sanusi 2016: 33). Pendidikan politik di dalam partai dapat dilihat dari segi kognitif, psikomotor dan afektif. Pendidikan politik partai juga dapat dilihat dari proses kaderisasi serta dapat dilihat dari model kaderisasi partai. Partai politik apabila tidak melakukan

pendidikan politik dengan baik yang ada dalam AD/ART maka partai tersebut gagal dalam melakukan pengkaderan di dalamnya, sehingga fokus penelitian untuk melihat kaderisasi partai sebagai berikut:

Pendidikan politik (Sanusi 2016: 33) terdapat tiga aspek, yaitu:

1. Pengetahuan: yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal.
2. Keterampilan: yang terdiri dari keterampilan intelaktual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi.
3. Sikap dan nilai-nilai prosedural yang terkandung dalam AD/ART Partai.

Proses kaderisasi parpol (Permana: 2015: 761) ada empat hal pokok yaitu:

1. Pelaku kaderisasi (subjek): yaitu organ partai politik yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi.
2. Sasaran kaderisasi (objek): merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi partai politik.

Sedangkan fokus penelitian pada model kaderisasi (Rivai 2014: 96) diantaranya:

1. Kaderisasi formal : cenderung lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, dan terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kaderisasi informal : yaitu yang memiliki indikator berkepribadian positif, gigih, berloyalitas, berdedikasi terhadap organisasi, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa..

C. Jenis dan Sumber data

Bagi Lofland sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moloeng 2014:157). Secara umum sumber data ialah hal atau orang ataupun tempat yang memang dijadikan sebagai sebuah acuan peneliti untuk melakukan analisis data.

Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

   Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan dari keterkaitan narasumber dengan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara sehingga hasil wawancara yang menjadi data primer dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang sudah terssedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder ini guna untuk melengkapi informasi yang didapat atau sebagai penunjang data primer yang berupa:

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
   b. AD/ART Partai Gerindra
   c. Artikel lainnya seperti media online, website, jurnal penelitian, dan sebagainya.

d. Data calon legislatif yang tersangkut korupsi pada pemilihan legislatif 2019.

D. Informan

Informan ialah orang yang memberikan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2012: 20) mengatakan bahwa *purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel berdasarkan kepentingan tertentu. Penggunaan *purposive sampling* ini digunakan untuk menentukan anggota sampel yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik tersebut merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui analisis kegagalan kaderisasi partai gerindra dalam pemilihan legislatif 2019. Penulis memfokuskan informan pada DPD Partai Gerindra di Provinsi Lampung pengurus Partai, kader partai, KPU provinsi Lampung, Bawaslu provinsi Lampung, pengamat politik serta akademisi Universitas Lampung.

Tabel 5. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Maliki Ahyar, S.H, M.H	Sekretaris (Humas DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung)
2.	Jauhari	Kader Partai Gerindra
3.	Rian Yudi A.	Kasubag KPU Provinsi Lampung
4.	Ricky	Bawaslu Provinsi Lampung
5.	Dr. Deddy Hermawan S.Sos, M.Si	Pengamat Politik Universitas Lampung
6.	Firmansyah	Caleg DPRD Kota Bandar Lampung
7.	Budi Harjo S.Sos, M.IP	Akademisi Universitas Lampung

Sumber: Diolah peneliti 25 November 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstrukturdan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang setiap pertanyaan sudah ada alternatif jawaban. Kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas yang dilakukan peneliti hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan (Sugiyono 2012: 25).

   Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan

responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang dilakukan terhadap satu orang responden akan mendapatkan informasi yang relatif lebih bersifat obyektif bila dibandingkan dengan responden lebih dari dua orang atau kelompok (Subagyo 2006: 39).

Penulis mengunakan metode wawancara ini dalam pengumpulan data ini karena dengan melakukan wawancara penulis dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan narasumber dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan langsung dari sumbernya. Wawancara yang dilakukan menggunakan panduan wawancara sebagai acuannya.

Metode wawancara ditujukan kepada beberapa informan yaitu DPW Partai Gerindra di Provinsi Lampung yaitu pengurus DPW Partai Gerindra Provinsi Lampung, kader partai beserta caleg yang diusung oleh partai, pengamat politik Universitas Lampung, KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, serta Akademisi Universitas Lampung Wawancara kepada beberapa informan tersebut dilakukan pada tanggal 9 November-28 Januari 2019 untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data ini merupakan sarana pembantu penulis dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman dan sebagainya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian (Sarwono 2006: 225).

Alasan penulis mengunakan studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan bukti yang riil bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan beberpa metode dan jawaban dari panduan wawancara yang disusun penulis. Dokumentasi juga bisa dijadikan sebagai acuan penulis berupa fenomena yang diabadikan untuk jangka waktu yang lama.

Dokumen tertulis pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, data kader Gerindra yang berasal dari website KPU Provinsi Lampung, susunan struktur kepengurusan DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, AD/ART Partai Gerindra serta website Partai Gerindra.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data atau disebut juga proses pra-analisis data (Sarwono 2006:135). Penulis pada penelitian ini memperoleh data dari lapangan sehingga penulis dituntut dalam melakukan pengolahan data yang telah terkumpul yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing Data*

   Proses editing merupakan proses dimana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul (Sarwono 2006: 135). Tahapan ini digunakan untuk mengedit data-data yang maih terdapat kesalahan dalam penulisannya.

2. Interpretasi Data

   Interpretasi data pada penelitian ini dengan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang ada tetapi data juga diinterpretasikan secara baik untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hasil penelitian. Penulis memberi penjabaran serta penjelasan dari berbagai data yang telah masuk dan melewati tahap editing. Interpretasi penulisan dilakukan oleh penulis untuk menampilkan data yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat rahasia sehingga penulis memilah kata yang terbaik agar tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan berbagai pihak (Sugiyono 2012: 30)

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah ataupun mengkaji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono 2012: 34). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data (*display data)*

   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data. Catatan-catatan penting dilapangan disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

3. Verifikasi Data

   Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan anatara data yang terjadi ada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2012:40). Penelitian ini menggunakan teknik kebsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu yang dibagi menjadi tiga yaitu yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mencapai keabsahan yaitu menggunakan triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan

informan satu dan lainnya maupun dengan sumber lain seperti jurnal dan berita online. Data dari informan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan informan lain juga sebagai cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Partai Gerindra

Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Partai Gerindra ini merupakan singkatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan (http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB).

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Deklarasi di dalamnya termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 (http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB).

Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli (http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB).

Perdebatan cukup panjang dan alot telah selesai, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Pematangan konsep partai pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli (http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB).

Pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto. Terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia, atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, kami yang bertanda tangan di bawah ini mendeklarasikan berdirinya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang (http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB).

B. Visi dan Misi Partai Gerindra

1. Visi

Visi Partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi (AD ART Partai Gerindra 2012: 5).

2. Misi

1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemertaan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3) Membentuk tatanan sosial dan politik mayarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.
5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilihan Legislatif atau Pemilihan Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan (AD ART Partai Gerindra 2012: 5).

C. Tujuan dan Fungsi Partai Gerindra

1. Tujuan Partai Gerindra

1) Mempertahankan dan mengamalkan pancasila serta menegakkan Undang-Undang 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.
2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Mewujudkan kedaulatan rakyat daaam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

2. Fungsi Partai Gerindra

1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam meumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat pancasila.
5) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6) Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945.
7) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang.
8) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Struktur Kepengurusan Partai Gerindra Provinsi Lampung

1. Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Parai Gerindra Provinsi Lampung:

Ketua	**: H. Gunadi Ibrahim S.E**
Wakil Ketua	: Drs. Mihdar Ilyas, MM
Wakil Ketua	: M. Jimmy Khomeini E, S.H
Wakil Ketua	: Ny. Elly Wahyuni , S.E, M.M

Wakil Ketua	: Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H
Wakil Ketua	: M. Fahruddin
Wakil Ketua	: Azwar Safarudin
Wakil Ketua	: Ny. Watiah
Wakil Ketua	: Hendra
Wakil Ketua	: Drs. MD. Kresna
Wakil Ketua	: I Made Suarjaya, S.H
Sekretaris	**: Pattimura, S.E**
Wakil Sekretaris	: Waris Bauki, S.H
Wakil Sekretaris	: A. Arfan Feri Dalimonte
Wakil Sekretaris	: Asroni Paslah
Wakil Sekretaris	: Ny. Hj. Meisy Leliyana Sari, S.E
Wakil Sekretaris	: Willy Lesmana
Wakil Sekretaris	: Ny. Elis Herlina, S.E, M.M
Wakil Sekretaris	: Ny. Trie Eka Fitri
Wakil Sekretaris	: Ny. Nyi Ayu Faziah
Wakil Sekretaris	: Ny. Aderly Imelia Sari, S.T
Bendahara	**: Harry Ananda**
Wakil Bendahara	: Munawir Somad
Wakil Bendahara	: Ny. Imelda
Wakil Bendahara	: Vinarto, S.A.G
Wakil Bendahara	: Ny. Dwi Oktavianti, S.E

2. Susunan Personalia Dewan Penasehat Daerah Partai Gerindra Provinsi Lampung:

Ketua	**: Drs. Hi. Azhar Ali**
Anggota	: Ir. Hi. Rahmat Abdullah
Anggota	: Ir. Hi. Ibrahim B.S
Anggota	: Drs. Hi. Risman Sesunan, M.M
Anggota	: Drs. Murjito
Anggota	: Drs. Sutomo
Anggota	: Drs. H. Rudi. Haryono, M.M
Anggota	: Drs. Ahmad Nyerupa, S.H
Anggota	: Drs. H. Amir, AR
Anggota	: Drs. Lazuardi Alwi
Anggota	: Aburahman Bafadhol
Anggota	: Drs. Rifdi Arif, M.M
Anggota	: Drs. H. Erpani S. Jaya
Anggota	: Dadang Amirudin
Anggota	: Ben Bella
Anggota	: Kisro Eddy
Anggota	: Hj. Mulyana Gusrisiani
Anggota	: Ir. Johansyah
Anggota	: Koharudin
Anggota	: Mega Putra
Anggota	: Yan Rofialam
Anggota	: Ahmad Hasan

Anggota	: Erwin Kartadilaga
Anggota	: Endang Mustika
Anggota	: Dra. Ummu Khoir
Anggota	: Ulfa Irasrika
Anggota	: Ratan Gofaldas
Anggota	: M.Fadhil
Anggota	: Drs. Hi. Wasti Burhan, M.M
Anggota	: Darlian Pone, S.H, M.M

3. Struktur Kepengurusan Bagian Bidang-bidang DPP Partai Gerindra

Ketua Umum	**: Prof. Dr. Ir. Suhardi. Msc**
Wakil Ketua Umum Politik dan Keamanan	**: Fadli Zon Ph.D**
Ketua Bidang Politik Dalam Negeri	: Hairudin
Ketua Bidang Politik Luar Negeri	: Irianto Subiakto. SH. LLM
Ketua Bidang Hukum	: Ny. Irmanty Habie
Ketua Bidang HAM	: Johan J. Lewerissa. SH. MH
Ketua Bidang Pertahanan	: Muhammad Haris. SIP
Ketua Bidang Keamanan	: Syukrianto Yulia. M.Fin.
Ketua Bidang Humas dan Media Massa	: M. Asrian Mirza
a. Kadep Humas	: Wendra. S.Sos
b. Kadep Media Massa	: Ondy Saputra
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga	: Nesya Fitriani Gayo
a. Kadep Hubungan dengan Parpol	: Ny. Eva Nur Fajriyah
b. Kadep Hubungan dengan Ormas	: Hilmi Rohman
Ketua Bidang Pemerintahan Daerah	: Munatsir Mustaman. SH.
a. Kadep Otonomi Daerah	: Drs. M. Solihat
b. Kadep Pembangunan Daerah Tertinggal	: Gatot Garjito
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Kombes (Purn) Dr. Alfons Loe Mau. M.si
Ketua Bidang Pengembangan Jatidiri Bangsa	: Rahmat S.A. Harahap
Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Bela Negara	: Kol. Inf (Purn) Sahala Silalahi
Ketua Bidang Pemantapan Ideologi	: helmi Adam S.Sos, S.pd

Wakil Ketua Umum Kesejahteraan Rakyat : **Ny. Halida Hatta**
Ketua Bidang Sosial : Aulia Bonanza. MBA
a. Kadep Bantuan Sosial : Syihabuddin AR, SE
b. Kadep Anak Terlantar dan Jalanan : Anwar Santoso
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat : A.S Kobalen. SE. MBA Mphil
Ketua Bidang Perempuan : Ny. Anita Aryani
a. Kadep peranan Perempuan : Ny. Grace Rosa Htapea
Ketua Bidang Lingkungan Hidup : Dhohir Farisi
a. Kadep Pencemaran Lingkungan Hidup : Hery Susanto. Msi
b. Kadep Perbaikan Lingkungan Hidup : Ny. Waskita Rini
Ketua Bidang Pendidikan : Nn. Durotun Nafisah
a. Kadep Pendidikan Formal : Ny. Irma Rahayu Nasution
b. Kadep Penidikan Non Formal : Ade Reza Haruyadi. SIP Msi
Ketua Bidang Seni : Jamal Mirdad
Ketua Bidang Budaya : Samuel Lengkey
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Gudfan Arief
a. Kadep Pemuda dan Olahraga : Yan Firwan
Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Fami Fachruddin
a. Kadep Ilpengtek Terapan : Ivan Vendri Latief
Ketua Bidang Tenaga Kerja &TKI : Fx. Arief Poyouno. SE
a. Kadep Perburuhan : Drs. Ansori
b. Kadep Tenaga Kerja Asing : Yudi Sabang. SH
Ketua Bidang Transmigrasi : Irwansyah
Ketua Bidang Agama : Habib Machdi Alatas
Ketua Bidang Kesehatan : dr. Benyamin Paulus Oktavianus. Sp. P
a. Kadep Kesehatan Masyarakat : dr. Fitzgerald Patty
b. Kadep Kesehatan Ibu dan Anak : Prof. Dr. Dr. Sarjana. Sp. OG (K). SH
Ketua Bidang Pemberdayaan Pembangunan Daerah : Agus Priyono
a. Kadep Pemberdyaan Potensi daerah : Djoko Gudhiyanto
b. Kadep Pembangunan Daerah : Ny. Dra. Raj. Noveria Parasari
Ketua Bidang Pariwisata : Feryzal Adham. SE. MM

a. Kadep Pendataan Wisatawan : Moh. Nizar
b. Kadep Pengembangan Wisata : Dian Melani Hakim
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana : Ariza Patria
Ketua Bidang Pertanahan : Eddy J Wibowo SH.

Wakil Ketua Umum : Murphy Hutagalung. MA
Ekonomi, Keuangan, Indusstri dan Pembangunan
Ketua Bidang Perbankan dan Moneter : Budi Tjahjono Prawiro
Ketua Bidang Ekonomi : Kusfiardy
a. Kadep Pedagang Pasar : Dias bagaskara Dewantara. SE
Ketua Bidang Ketahanan Pangan : Ir. Soepriyatno
Ketua Bidang Tani : Herry Gunawan
Ketua Bidang Nelayan : Ir. Suminta Ismail
Ketua Bidang Koperasi : Abdul Hakam
Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Zacharias Omawele. SH
a. Kadep Usaha Mikro dan Kecil : Mahendra Dito Sampurno. SH
b. Kadep Usaha Menengah : Cornelis Suharyanto
Ketua Bidang Pertambangan dan Energi : Dirgo D. Purbo
a. Kadep Migas : Ir. Dial Alawiyah. MH
b. Kadep Pertambangan : Cholik Muhammad
Ketua Bidang Energi Alternatif : Ir. Bambang Irawan
Ketua Bidang Kelautan : Laksda TNI (Purn) Ferdinand Manengkel
Ketua Bidang Pengembangan Tanaman Industri : Herdy Adrianto. SE
Ketua Bidang Peternakan : Dr. Drh. Kamaludin Zarkasi. E
Ketua Bidang Perikanan : Ikhwan Amirudin
Ketua Bidang Kehutanan : Ir. Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Industri : Aan Rudianto. SH
Ketua Bidang Perdagangan : Arnes Nasution
Ketua bidang Perumahan Rakyat : Amir Gaos Latuconsina
Ketua Bidang Jasa Keuangan : Evi Safari Daskian
Ketua Bidang BUMN : Dr. Ir. Hasan Saman
Ketua Bidang Perpajakan dan Bea Cukai : HMS Hadinagoro

Wakil Ketua Umum : Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR
Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Ir. Sufmi Dasco. SH. MH
a. Kadep Organisasi : Ir. Rahmat Marzuki
b. Kadep Keanggotaan : Sugiyanto H. Semanggun
Ketua Bidang Informasi Strategis : Sugiono. MM, MBA
Ketua Bidang Kaderisasi : Desmon Junaidi Mahesa
a. Kadep Pendataan Kader Partai : Nn. Srihardianti.H. M
b. Kadep Pengembangan Kader Partai : Sabam Rajagukguk
Ketua Bidang Hubungan Lembaga Internal : Pius Lustrilanang
Ketua Bidang Litbang : Idin Rosidin
a. Kadep Litbang Organisasi dan Prosedur : Said Bakhri
b. Kadep Litbang Kebijakan Politik : Andi Seto Gadysta Asapa
Ketua Bidang Diklat : Edhy Prabowo. MM. MBA
a. Kadep Analisa & Evaluasi Diklat Kader : Taufiqurrahman
b. Kadep Akademik Diklat Kader : Azis Muslim
Ketua Bidang Pembinaan Mental Ideologi : M. Zastrouw
Ketua Bidang Advokasi : Habiburokhman. SH
a. Kadep Advokasi TKI : Idrus Mony. SH
b. Kadep Advokasi Pedagang Pasar Tradisional : Kusminto Basuki
Ketua Bidang Penggalangan Masyarakat : Seno Broto
a. Kadep Bimbingan Masyarakat : Ahmad Jojon
Ketua Bidang Pengembangan SDM : Ibnu Ariebowo

Sekretaris Jenderal	**: Ahmad Muzani**
Wakil Sekretaris Jenderal	**:** 1. Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende SIP
	2. Abdul Harris Bobihoe
	3. Kol. CHB (Purn) Dalkijo SH, SE
	4. Aryo Djojohadikusumo
	5. Sally Rosalina
	6. Ahmad Subagya
	7. Bagiade, SH
	8. Heru Johansya
	9. Taslim Azis
	10. Idham Chalid
	11. Ny. Husna
Bendahara Umum	**: T. A Muliatna Djiwandono**
Bendahara	**:** 1. Nuroji
	2**.** Ny. Resiya Safri
	3. Ny. Mintarsih
	4. Dwi Sasongko
	5. Kol. Caj. (Purn) Suhary Z.B
	6. Satrio Dimas Adityo

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan dengan menggunakan teori tentang pendidikan politik, proses kaderisasi dan model kaderisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendidikan Politik

1. Kognitif. Berdasarkan hasil penelitian partai Gerindra Provinsi Lampung telah melakukan pendidikan politik semi militer untuk membangun mental ideologi para kader, serta kader dapat memahami visi misi partai, dan dengan adanya tes IQ dapat menyaring kader-kader yang berintelektual.
2. Psikomotor. Berdasarkan hasil penelitian kader partai Gerindra Provinsi Lampung sebelum mendapatkan pendidikan politik para kader sama sekali tidak memiliki pengetahuan khusus tentang partai tetapi setelah mengikuti pendidikan politik mereka sudah memiliki kemampuan dalam tindakan, berkomunikasi dan pengetahuan khusus dan kader partai Gerindra telah memiliki *basic* sebelum masuk ke dalam partai. Kegagalan kaderisasi dalam segi psikomotor terlihat dari masuknya penyusup di dalam partai Gerindra ini yang diindikasikan

sebagai kegagalan kaderisasi. Masuknya penyusup tersebut juga tidak diketahui oleh partai seberapa banyak kader tersebut. Partai Gerindra Provinsi Lampung juga terindikasi gagal karena dalam pendidikan politik yang telah dilakukan banyak kader yang memutuskan keluar dari partai dengan alasan tidak kuat untuk melanjutkan pendidikan politik di dalam partai

3. Afektif. Dari segi afektif partai Gerindra tidak terindikasi gagal karena partai Gerindra Provinsi Lampung telah melakukan Rakerda secara rutin satu bulan 2 kali secara berkelanjutan. Adanya Rakerda ini membantu para kader agar mendapat wawasan yang luas.

Proses Kaderisasi

1. Pelaku Kaderisasi. Dari segi pelaku kaderisasi Partai Gerindra Provinsi Lampung masih memiliki tantangan dan hambatan dalam proses kaderisasi seperti adanya kutu loncat partai dan partai Gerindra gagal dalam melakukan pengkaderan dengan masuknya mantan narapidana korupsi pada pemilihan legislatif 2019. Partai Gerindra juga tidak melihat rekam jejak kader untuk maju dalam pencalonan di pemilihan legislatif 2019. Partai Gerindra Provinsi Lampung tidak mempermasalahkan adanya hubungan keterikatan keluarga dalam pencalonan sehingga hal ini berpengaruh pada partai untuk mendongkrak suara saat pemilihan.
2. Sasaran Kaderisasi. Dari segi sasaran kaderisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Gerindra Provinsi Lampung masih belum

tepat sasaran dan terindikasi gagal dalam pengkaderan karena masih adanya kader yang menerapkannya di partai lain. Sasaran kaderisasi dalam partai Gerindra ini belum tepat yang menyebabkan adanya kutu loncat di dalam partai, dan partai Gerindra tidak melihat rekam jejak kader yang akan masuk ke dalam partai sehingga ketika kader tersebut maju dalam pencalonan maka diloloskan walaupun kader tersebut memiliki latar belakang yang kurang baik.

Model Kaderisasi

1. Model kaderisasi partai Gerindra Provinsi Lampung adalah formal dan secara terbuka untuk siapa pun. Dari segi model kaderisasi partai Gerindra hanya mementingkan kebutuhan internal untuk mencari masa sebanyak-banyaknya.

B. SARAN

1. Partai Gerindra Provinsi Lampung dalam melakukan pendidikan politik seharusnya dilakukan pemantauan agar tidak adanya kader yang berpindah-pindah di dalam partai karena hal tersebut dapat merugikan partai nantinya. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Gerindra Provinsi Lampung juga harus menekankan pada potensi yang ada agar menciptakan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas.
2. Partai Gerindra Provinsi Lampung seharusnya lebih memperhatikan rekam jejak calon legislatif yang akan dicalonkan untuk menghindari pemberitaan yang negatif tentang partai. Rekam jejak para kader sangat

diperlukan agar partai dinilai bersih dari tindakan yang negatif seperti korupsi.

3. Partai Gerindra Provinsi Lampung seharusnya mengumumkan ke media jika kader partai yang menjadi calon legislatif berlatar belakang koruptor. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menentukan pilihannya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arifin, Anwar. 2013. *Perspektif ilmu politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia Jakarta

Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. PT Graha Ilmu: Yogyakarta.

Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Safa'at, Moch Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik.* Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Joko. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Schumpter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism & Democracy*. London and New York: Routledge.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Zainal, Veithzal dkk. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cet ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 1 Halaman 49-57.

Arisandi, Rachman Sidharta. 2016. Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota. *Jurnal Kaian Politik dan Masalah Pembangunan.* Vol 12 No. 02 Halaman 1867-1878.

Djuyandi, Yusa. 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *HUMANIORA.* Vol. 5 No. 2 halaman, 1202-1212.

Fajrina, Amaliya Hidayatul. 2017. Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Muda.* Vol. 6, No 1, Januari-Maret 2017 halaman 1-6.

Harahap, Insan Harahap. Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional. *Paper Kerja.* Dosen Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Bakrie halaman 1-9.

Iskandar, Dian. 2016. Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2, No. 1. Halaman 26-37.

Lumingkewas, Febrian R. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi di Kabupaten Minahasa Selatan). *Paper Kerja*. halaman 1-9.

Permana, Aditya Surya dan Adi, Agus Satomoko. 2015. Jurnal Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik **(**Studi Terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (Pdi-Perjuangan) Kabupaten Nganjuk). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan.* Vol. 01 No. 03 halaman 754-769.

Rahmat Aulia dan Hasan, Effendi. 2017. Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang PadaPilkada Tahun 2017 Di Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah.* Vol. 2 No.4 halaman 21-31.

Sanusi, Aris Risnadi dan Darmawan, Cecep. 2016. Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.* Vol 25, No. 1 Halaman 24-40.

Sutisna, Agus. 2017. Gejala Poliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Vol 2 No. 2 halaman 100-120.

ARTIKEL-ARTIKEL

Ayuwuragil, Kustin. 2018. *Caleg Eks Koruptor Dpilih Karena Unggul Materi*, dalam cnnindonesia.com edisi 23 Juli 2018, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180723055204-32-316155/caleg-eks-koruptor-dipilih-karena-unggul-materi pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 23.43 WIB.

Chusna, Fitria Farisa. 2018. *Partai Gerindra Ajukan Caleg Eks Koruptor Paling Banyak* dalam kompas.com edisi 20 September 2018, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/20583221/partai-gerindra-ajukan-caleg-eks-koruptor-paling-banyak, diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 21.10 WIB.

Data KPU Daftar Calon Sementara dalam https://lampung.kpu.go.id/, diakses pada 2 September 2018 pukul 21.27 WIB.

Data ICW Calon legislatif Tersangkut Korupsi Pada Pemilihan Legislatif 2019 dalam https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/15/nbxy1j-pdip-dan-demokrat-penyumbang-terbanyak-caleg-terpilih-korup, diakses pada 20 September 2018 pukul 21.24 WIB.

Data Bawaslu Nama Caleg Bermasalah Di Lampung Tahun 2018 dalam Pemilihan Legislatif 2019 dalam https://pelitanusantara.co.id/2018/07/disfungsi-kaderisasi-caleg-gerindra-mantan-sekda-terpidana-narkoba/, diakses pada 3 September 2018 pukul 20.09 WIB).

Data Bawaslu Bakal Calon Legislatif Mantan Korupsi Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/20583221/partai-gerindra-ajukan-caleg-eks-koruptor-paling-banyak, diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 21.10 WIB.

Emerald Alamsyah, Ichsan. 2014. *PDIP dan Demokrat Penyumbang Terbanyak Caleg Terpilih Korupsi* dalam republika.co.id edisi 15 September 2014, diakses https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/15/nbxy1j-pdip-dan-demokrat-penyumbang-terbanyak-caleg-terpilih-korup, diakses pada 20 September 2018 pukul 21.24 WIB.

Isworo, Triyadi. 2018. *Koruptor Itu Kejahatan Luar Biasa, Tolak Caleg Bermasalah* dalam lampost.co edisi 16 September 2018, diakses dari http://www.lampost.co/berita-koruptor-itu-kejahatan-luar-biasa-tolak-caleg-bermasalah.html, diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 20.15 WIB.

Mediyansyah. 2018. *Banyaknya Caleg Impor di Lampung Pengamat Politik: Ini Kegagalan Kaderisasi Parpol* dalam kupastuntas.co edisi 15 Agustus 2018, diakses dari https://www.kupastuntas.co/2018/08/banyaknya-caleg-impor-di-lampung-pengamat-politik-ini-kegagalan-kaderisasi-parpol/, diakses pada 02 September 2018 pukul 20:35 WIB.

Ngopi Bareng. 2018. *Inilah Nama 38 Narapidana Yang Menjadi Caleg* dalam Kumparan.com edisi 21 September 2018, diakses dari https://kumparan.com/ngopibareng/inilah-nama-nama-38-mantan-narapidana-korupsi-yang-jadi-caleg, diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 19.45 WIB.

Pelita Nusantara. 2018. *Disfungsi Kaderisasi, Caleg Gerindra Mantan Sekda Terpidana Narkoba* edisi 17 Juli 2018, diakses dari https://pelitanusantara.co.id/2018/07/disfungsi-kaderisasi-caleg-gerindra-mantan-sekda-terpidana-narkoba/, diakses pada 3 September 2018 pukul 20.09 WIB).

Rifai, Bahtiar. 2018. *Ini Daftar 17 Caleg Eks Koruptor Yang Diloloskan Bawaslu* dalam detiknews.co edisi 4 September 2018, diakses dari https://news.detik.com/berita/4197520/ini-daftar-17-caleg-eks-koruptor-yang-diloloskan-bawaslu, pada tanggal 10 September 2018 puku 21.00 WIB

Yulianto, Tri. 2018. *Alhajar Syahyan Akhirnya Sah Masuk DCT Pileg 2019* dalam tribunlampung.co.id edisi 20 September 2018, diakses dari http://lampung.tribunnews.com/2018/09/20/sah-akhirnya-alhajar-syahyan-masuk-dct-pileg-2019, diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 21.30 WIB.

www.kpu.go.id. *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia*. Diakses tanggal 9 November 2018 pukul 13.10 WIB

LAIN-LAIN

AD/ART Partai Gerindra

Haris, Syamsuddin dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia.* Modul. Jakarta: LIPI.

Prakoso, Danny Widodo Uji Prakoso. 2017. *Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Pada Pilkada Kabupaten Pati.* Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro halaman 1-20.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Website Partai Gerindra. http://partaigerindra.or.id diakses pada 12 November 2018 pukul 21.35 WIB.